



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Cirebon**



**Jalan Sunan Muria Nomor 100 Sumber Kabupaten Cirebon**

**Telp/Fax. (0231) 320816**

**Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id>**

# Kata Pengantar

---

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah karena atas ijin-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dapat kami susun. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renja disusun dalam waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RENSTRA BKPSDM Kabupaten Cirebon dan mengacu pada RKPD yang telah disahkan. Dokumen Renja menjabarkan tentang tujuan, sasaran, target program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Semoga dokumen Renja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Masukan mengenai penyempurnaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sangat diharapkan agar kinerja Perangkat Daerah ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

# Daftar Isi

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	3
1.3 Maksud dan tujuan .....	4
1.4 Sistematika penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .....	6
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu & capaian Renstra PD...6	
2.2 Analisis kinerja pelayanan PD... ..	19
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.....	22
2.4 Review Rancangan awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD .....	39
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD .....	40
3.3 Program dan kegiatan .....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD .....	46
4.1 Rencana kerja dan pendanaan PD.....	51
BAB V PENUTUP .....	56
5.1 Penutup.....	56

# Daftar Tabel

---

Tabel II.1 Tabel ringkasan anggaran perubahan BKPSDM Tahun 2023.....	7
Tabel II.2 Tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 .....	10
Tabel II.3 Tabel indikator kinerja PD yang mendukung tujuan dan sasaran RPD 2025-2026 .....	20
Tabel II.4 Tabel pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM.....	21
Tabel II.5 Tabel review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025.....	25
Tabel III.1 Tabel kodefikasi, nomenklatur, serta rencana anggaran BKPSDM Tahun 2023 .....	42
Tabel IV.1 Tabel program dan kegiatan perangkat daerah.....	47

# Daftar Gambar

---

Gambar 1.1 Gambar tahap penyusunan Renja BKPSDM 2023 .....	2
--	---



# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi:**

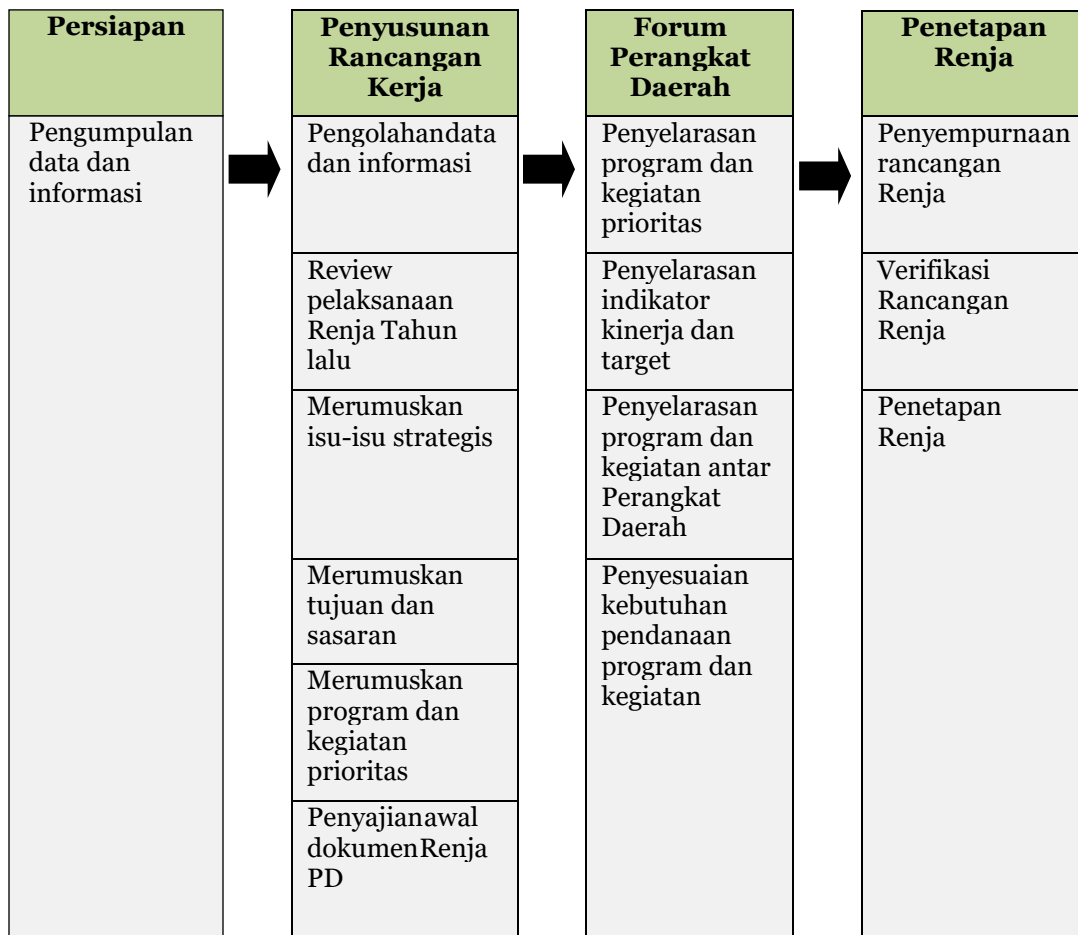
1. *Latar Belakang*
2. *Landasan Hukum*
3. *Maksud dan Tujuan*
4. *Sistematika penulisan*

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang berisi penjabaran dari program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan dan mengolah data serta informasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPSDM yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPSDM dan tahap penyajian rancangan Renja BKPSDM. Proses penyusunan Renja BKPSDM diakhiri dengan penetapan Renja BKPSDM. Penetapan rancangan akhir Renja BKPSDM dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala BKPSDM menetapkan Renja BKPSDM untuk menjadi pedoman di lingkungan BKPSDM dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BKPSDM pada tahun 2025. Proses penyusunan Renja PD ditunjukkan pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan Renja BKPSDM 2025**



Sumber : PEP BKPSDM Kab. Cirebon

Keterkaitan antara Renja PD 2025 dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra PD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja PD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Renstra (Rencana Strategis) PD dan RPD (Rencana Pembangunan Daerah).

Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan berpedoman kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2025-2026, serta bersifat indikatif yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Sejalan dengan Tujuan ke 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Kolaboratif, sehingga sasaran utama yang akan di capai adalah Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat yang sesuai dengan tujuan BKPSDM Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Dokumen Renstra PD yang kemudian akan dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2025.

Renja BKPSDM Kabupaten Cirebon digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BKPSDM dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan BKPSDM yang akan dibiayai APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E.4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 153 Tahun 2023).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025 untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM ASN Kabupaten Cirebon dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025 antara lain :

1. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
2. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun 2025.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika penulisan**

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**



## BAB 2

# Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra;*
2. *Analisa kinerja pelayanan;*
3. *Isu-isu penting;*
4. *Review rancangan awal RKPD*
5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan*

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra PD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

BKPSDM Kabupaten Cirebon telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Cirebon melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp 19.872.458.560,-. Ringkasan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon di tunjukan pada Tabel II.1, sebagai berikut :

**Tabel II.1 Ringkasan Anggaran Perubahan BKPSDM  
Tahun 2023**

Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp.)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp.)
<b>5. Belanja Daerah</b>	<b>15.468.408.700</b>	<b>19.872.458.560</b>
<b>5.1. Belanja Operasi</b>	<b>15.468.408.700</b>	<b>19.872.458.560</b>
5.1.01. Belanja Pegawai	11.440.288.500	14.144.936.960
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa	4.028.120.200	5.727.521.600
<b>Jumlah</b>	<b>15.468.408.700</b>	<b>19.872.458.560</b>

Sumber: DPPA BKPSDM Kabupaten Cirebon

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 15.468.408.700,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023, Anggaran BKPSDM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan sehingga total anggaran menjadi Rp 19.872.458.560,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 19.872.458.560,- untuk belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon tahun 2023, pada umumnya telah memperlihatkan kinerja yang baik, dengan uraian sebagai berikut :

*a. Program Kepegawaian Daerah*

Persentase indikator program Kepegawaian Daerah antara lain 10% Perencanaan Kebutuhan ASN, 10% Pengadaan ASN, 32% Pengembangan Karir, 10% Promosi dan Mutasi, 20% Manajemen Kinerja, 10% Penggajian Penghargaan dan Disiplin, 4% Perlindungan dan Pelayanan, serta 6% Sistem Informasi. Penataan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon selain penataan dengan melakukan analisis jabatan, menyusun data peta jabatan yang kemudian menghasilkan data analisis kebutuhan pegawai sebagai dasar penyusunan formasi pegawai juga melaksanakan penataan yang merupakan hasil dari pelaksanaan analisis dan perencanaan dan perancangan kebutuhan pegawai dalam rangka memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahun 2023, realisasi jumlah ASN yang tertata sudah mencapai target sebanyak 17.800 orang yang terdiri dari 9.490 orang PNS dan 8.310 orang PPPK telah ditetapkan dengan capaian 100%.

Ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Secara umum pengertian pelayanan administrasi kepegawaian adalah menyediakan segala macam yang diperlukan oleh pegawai termasuk

pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintah. Indikator ketepatan waktu pelayanan dijadikan indikator ukuran, bahwa tidak ada penundaan pemrosesan layanan sejak diajukan sampai dengan selesainya pelayanan di BKPSDM Kabupaten Cirebon. Berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian, pada Program Kepegawaian Daerah terdapat beberapa jenis layanan kepegawaian, antara lain :

- a. Layanan pengajuan kenaikan pangkat ASN;
- b. Layanan pengajuan penghargaan Satyalancana;
- c. Pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin;
- d. Penyelesaian administrasi TPP;
- e. Pengajuan Karis, Karsu, Karpeg, Cuti;
- f. Layanan terhadap pejabat fungsional tertentu (JFT);
- g. Rekomendasi Tugas Belajar;
- h. Rekomendasi Izin Belajar;
- i. Penilaian Kompetensi Pegawai;
- j. Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan PangkatI;
- k. Layanan konseling pegawai;
- l. Pemrosesan pengajuan izin untuk melangsungkan perceraian;
- m. Layanan pengajuan JKK dan JKM;
- n. Pengajuan pensiun bagi ASN yang memasuki masa pensiun; dan
- o. Layanan kepegawaian lainnya.

*b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Persentase indikator program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 40%. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap PNS dipersyaratkan untuk meningkatkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dalam waktu satu tahun. Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat mendukung kegiatan peningkatan kompetensi pegawai melalui dukungan APBD dalam melaksanakan pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan bagi ASN, baik fasilitasi, pengiriman maupun pelaksanaan/swakelola diklat oleh BKPSDM. BKPSDM Kabupaten Cirebon melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, melaksanakan Program pengembangan SDM, antara

lain : pelatihan kepemimpinan, pelatihan/bimbingan teknis dan fungsional, pelatihan dasar (Latsar), pemberian beasiswa pendidikan formal, kursus singkat sosialisasi/ desiminasi bagi ASN. Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan dihitung dari perbandingan antara Jumlah ASN yang lulus diklat dengan jumlah ASN yang mengikuti diklat Capaian program pengembangan SDM Tahun 2023 sebesar 100%.

Penjabaran Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan pencapaian Renstra BKPSDM s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Cirebon**

**Nama Perangkat Daerah : BKPSDM Kabupaten Cirebon**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> )/Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	Fisik	Keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5.	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5.03.	KEPEGAWAIAN																	
5.03.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100,00	10.499.712.972,00	100,00	1.513.360.748,00	100,00	830.680.200,00	100,00	740.244.039,00	100,00	89,11	100,00	903.887.900,00	300,00	3.157.492.687,00	300,00	30,07
		Meningkatnya disiplin aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100,00	57.189.500.720,00	100,00	11.553.136.038,00	100,00	14.144.936.960,00	100,00	13.627.702.635,00	100,00	96,34	100,00	14.956.092.000,00	300,00	40.136.930.673,00	300,00	70,18
		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100,00	1.154.363.025,00	100,00	90.150.900,00	100,00	74.412.000,00	100,00	74.412.000,00	100,00	100,00	100,00	103.226.000,00	300,00	267.788.900,00	300,00	23,20

		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100,00	394.348.791,00	100,00	28.285.000,00	100,00	16.456.300,00	100,00	16.456.300,00	100,00	100,00	100,00	16.306.600,00	300,00	61.047.900,00	300,00	15,48
		Terkembangnya sistem perencanaan sektoral, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100,00	173.368.080,00	100,00	20.822.800,00	100,00	11.850.000,00	100,00	11.850.000,00	100,00	100,00	100,00	20.437.500,00	300,00	53.110.300,00	300,00	30,63
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100,00	16.148.504.673,00	100,00	1.392.192.691,00	100,00	423.367.600,00	100,00	409.862.488,00	100,00	96,81	100,00	194.927.500,00	300,00	1.996.982.679,00	300,00	12,37
5.03.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4,00	310.832.875,00	1,00	123.810.700,00	1,00	91.042.000,00	1,00	91.042.000,00	100,00	100,00	1,00	128.394.500,00	3,00	343.247.200,00	75,00	110,43
5.03.0 1.2.01 .0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (Satuan: Dokumen)	3,00	53.368.080,00	2,00	20.822.800,00	2,00	11.850.000,00	2,00	11.850.000,00	100,00	100,00	3,00	20.437.500,00	7,00	53.110.300,00	233,33	99,52
5.03.0 1.2.01 .0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan: Laporan)	2,00	23.910.451,00	2,00	12.837.000,00	2,00	4.780.000,00	2,00	4.780.000,00	100,00	100,00	2,00	4.731.000,00	6,00	22.348.000,00	300,00	93,47
5.03.0 1.2.01 .0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: Laporan)	8,00	233.554.344,00	8,00	90.150.900,00	8,00	74.412.000,00	8,00	74.412.000,00	100,00	100,00	8,00	103.226.000,00	24,00	267.788.900,00	300,00	114,66

5.03.0 1.2.02 .	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: BA)</b>	<b>4,00</b>	<b>12.564.828. 120,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11.568.58 4.038,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14.156.6 13.260,0 0</b>	<b>1,00</b>	<b>13.639. 378.935 ,00</b>	<b>100, 00</b>	<b>96,35</b>	<b>1,00</b>	<b>14.967.6 67.600,0 0</b>	<b>3,00</b>	<b>40.175.63 0.573,00</b>	<b>75,0 0</b>	<b>319,75</b>
5.03.0 1.2.02 .0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/bulan)	12,0 0	12.503.000. 000,00	74,0 0	11.553.13 6.038,00	12,00	14.144.9 36.960,0 0	12,0 0	13.627. 702.635 ,00	100, 00	96,34	12,00	14.956.0 92.000,0 0	98,0 0	40.136.93 0.673,00	816, 67	321,02
5.03.0 1.2.02 .0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan)	1,00	19.602.659, 00	1,00	8.455.500, 00	1,00	6.573.70 0,00	1,00	6.573.7 00,00	100, 00	100,0 0	1,00	6.536.70 0,00	3,00	21.565.90 0,00	300, 00	110,02
5.03.0 1.2.02 .0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD, (Satuan: Laporan)	13,0 0	42.225.461, 00	13,0 0	6.992.500, 00	13,00	5.102.60 0,00	13,0 0	5.102.6 00,00	100, 00	100,0 0	13,00	5.038.90 0,00	39,0 0	17.134.00 0,00	300, 00	40,58
5.03.0 1.2.06 .	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (Satuan: BA)</b>	<b>4,00</b>	<b>1.682.962.4 32,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.127.087 .800,00</b>	<b>1,00</b>	<b>473.170. 700,00</b>	<b>1,00</b>	<b>473.140 .000,00</b>	<b>100, 00</b>	<b>99,99</b>	<b>1,00</b>	<b>546.337. 500,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.146.565 .300,00</b>	<b>75,0 0</b>	<b>127,55</b>
5.03.0 1.2.06 .0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	15.005.122, 00	10,0 0	8.254.300, 00	1,00	7.608.00 0,00	1,00	7.608.0 00,00	100, 00	100,0 0	1,00	7.500.90 0,00	12,0 0	23.363.20 0,00	1.20 0,00	155,70

5.03.0 1.2.06 .0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	875.000.000,00	255,00	801.212.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1,00	76.058.000,00	256,00	877.270.000,00	25.600,00	100,26
5.03.0 1.2.06 .0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	61.199.380,00	11,00	1.740.000,00	1,00	2.352.900,00	1,00	2.325.000,00	100,00	98,81	1,00	2.187.900,00	13,00	6.252.900,00	1.300,00	10,22
5.03.0 1.2.06 .0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	51.565.800,00	11,00	26.380.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1,00	0,00	12,00	26.380.000,00	1.200,00	51,16
5.03.0 1.2.06 .0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	139.333.273,00	17,00	48.028.100,00	1,00	69.344.400,00	1,00	69.344.400,00	100,00	100,00	1,00	68.324.100,00	19,00	185.696.600,00	1.900,00	133,28
5.03.0 1.2.06 .0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan, (Satuan: Dokumen)	12,00	100.920.161,00	12,00	43.200.000,00	12,00	83.915.000,00	12,00	83.915.000,00	100,00	100,00	12,00	83.856.200,00	36,00	210.971.200,00	300,00	209,05
5.03.0 1.2.06 .0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	139.333.273,00	68,00	45.882.600,00	1,00	179.619.500,00	1,00	179.616.700,00	100,00	100,00	1,00	183.975.700,00	70,00	409.475.000,00	7.000,00	293,88
5.03.0 1.2.06 .0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, (Satuan: Laporan)	12,00	48.139.608,00	11,00	10.800.000,00	12,00	15.360.000,00	12,00	15.360.000,00	100,00	100,00	12,00	15.301.200,00	35,00	41.461.200,00	291,67	86,13
5.03.0 1.2.06 .0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Satuan: Laporan)	12,00	122.465.815,00	12,00	91.989.700,00	12,00	97.837.900,00	12,00	97.837.900,00	100,00	100,00	12,00	102.927.600,00	36,00	292.755.200,00	300,00	239,05
5.03.0 1.2.06 .0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, (Satuan: Dokumen)	12,00	130.000.000,00	12,00	49.601.100,00	12,00	17.133.000,00	12,00	17.133.000,00	100,00	100,00	12,00	6.205.900,00	36,00	72.940.000,00	300,00	56,11

5.03.0 1.2.07 .	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (Satuan: BA)		2.938.250.000,00	0,00	491.000.000,00			0,00	0,00	#DI V/0!	#DIV/0!		0,00	491.000.000,00	#DI V/0!	16,71	
5.03.0 1.2.07 .0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan, (Satuan: Unit)	7,00	2.329.250.000,00	1,00	491.000.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	7,00	0,00	8,00	491.000.000,00	114,29	21,08
5.03.0 1.2.07 .0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, (Satuan: Unit)	2,00	609.000.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	0,00
5.03.0 1.2.08 .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4,00	1.263.556.600,00	1,00	435.874.048,00	1,00	374.642.500,00	1,00	284.237.039,00	100,00	75,87	1,00	363.756.300,00	3,00	1.083.867.387,00	75,00	85,78
5.03.0 1.2.08 .0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	12,00	900.000.000,00	12,00	384.467.102,00	12,00	339.642.500,00	12,00	249.237.039,00	100,00	73,38	12,00	328.761.200,00	36,00	962.465.341,00	300,00	106,94
5.03.0 1.2.08 .0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	1,00	61.056.600,00	11,00	51.406.946,00	1,00	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00	100,00	100,00	1,00	34.995.100,00	13,00	121.402.046,00	1.300,00	198,84
5.03.0 1.2.08 .0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	12,00	302.500.000,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00	0,00

5.03.0 1.2.09 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4,00	1.436.505.634,00	1,00	851.591.591,00	1,00	406.234.600,00	1,00	392.729.488,00	100,00	96,68	1,00	188.721.600,00	3,00	1.433.042.679,00	75,00	99,76
5.03.0 1.2.09 .0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, (Satuan: Unit)	23,00	500.000.000,00	23,00	116.005.600,00	23,00	137.846.000,00	23,00	126.137.500,00	100,00	91,51	23,00	22.565.000,00	69,00	264.708.100,00	300,00	52,94
5.03.0 1.2.09 .0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, (Satuan: Unit)	1,00	16.505.634,00	1,00	11.145.700,00	1,00	10.315.000,00	1,00	9.130.000,00	100,00	88,51	1,00	10.189.000,00	3,00	30.464.700,00	300,00	184,57
5.03.0 1.2.09 .0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit)	2,00	920.000.000,00	2,00	724.440.291,00	2,00	258.073.600,00	2,00	257.461.988,00	100,00	99,76	2,00	155.967.600,00	6,00	1.137.869.879,00	300,00	123,68
5.03.0 2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100,00	10.764.686.913,00	100,00	152.192.980,00	100,00	144.962.200,00	100,00	142.214.050,00	100,00	98,10	100,00	259.465.700,00	300,00	553.872.730,00	300,00	5,15
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100,00	4.646.049.192,00	98,82	413.273.039,00	93,90	114.880.300,00	93,90	93.467.600,00	100,00	81,36	100,00	358.819.500,00	292,72	865.560.139,00	292,72	18,63

		Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	10,06	28.277.277.327,00	9,04	539.293.787,00	9,86	676.495.300,00	9,86	668.274.927,00	100,00	98,78	10,06	460.929.700,00	28,96	1.668.498.414,00	287,87	5,90
		Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100,00	17.326.416.846,00	100,00	654.638.296,00	100,00	473.167.700,00	100,00	453.287.604,00	100,00	95,80	100,00	583.953.200,00	300,00	1.691.879.100,00	300,00	9,76
		Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	75,00	36.983.339.600,00	100,00	2.313.300.799,00	75,00	1.694.340.900,00	75,00	1.603.207.228,00	100,00	94,62	75,00	984.599.900,00	250,00	4.901.107.927,00	333,33	13,25
		Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	91,01	5.153.049.289,00	88,31	302.787.058,00	90,64	125.521.700,00	90,64	123.823.649,00	100,00	98,65	91,01	177.938.800,00	269,96	604.549.507,00	296,63	11,73
5.03.0 2.2.01 .	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, (Satuan: Regulasi)	1,00	7.834.944.107,00	1,00	1.246.680.400,00	1,00	779.678.700,00	1,00	673.084.500,00	100,00	86,33	1,00	1.225.882.500,00	3,00	3.145.647.400,00	300,00	40,15
5.03.0 2.2.01 .0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, (Satuan: Dokumen )	1,00	4.685.120.000,00	1,00	612.422.500,00	1,00	451.948.000,00	1,00	382.566.400,00	100,00	84,65	1,00	539.665.700,00	3,00	1.534.654.600,00	300,00	32,76
5.03.0 2.2.01 .0005.	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN, (Satuan: Dokumen )	1,00	444.445.077,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00

5.03.0 2.2.01 .0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, (Satuan: Dokumen)	12,0 0	337.647.400 ,00	817, 00	226.871.7 00,00	12,00	161.094. 900,00	12,0 0	152.316 .500,00	100, 00	94,55	12,00	196.019. 900,00	841, 00	575.208.1 00,00	7.00 8,33	170,36
5.03.0 2.2.01 .0007.	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN, (Satuan: Dokumen)	1,00	68.039.900, 00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/ 0!	1,00	0,00	1,00	0,00	100, 00	0,00
5.03.0 2.2.01 .0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi, (Satuan: Lembaga)	1,00	1.150.847.9 65,00	3,00	70.033.10 0,00	1,00	38.828.3 00,00	1,00	36.700. 000,00	100, 00	94,52	1,00	107.999. 500,00	5,00	214.732.6 00,00	500, 00	18,66
5.03.0 2.2.01 .0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, (Satuan: Dokumen )	1,00	362.855.180 ,00	1,00	67.144.40 0,00	1,00	70.498.4 00,00	1,00	67.445. 200,00	100, 00	95,67	1,00	266.440. 600,00	3,00	401.030.2 00,00	300, 00	110,52
5.03.0 2.2.01 .0011.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian, (Satuan: Dokumen )	6,00	91.655.126, 00	1,00	15.573.60 0,00	6,00	12.927.2 00,00	6,00	8.034.0 00,00	100, 00	62,15	6,00	23.377.9 00,00	13,0 0	46.985.50 0,00	216, 67	51,26
5.03.0 2.2.01 .0012.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, (Satuan: Laporan)	1,00	694.333.459 ,00	2,00	254.635.1 00,00	1,00	44.381.9 00,00	1,00	26.022. 400,00	100, 00	58,63	1,00	92.378.9 00,00	4,00	373.036.4 00,00	400, 00	53,73
<b>5.03.0 2.2.02 .0001.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, (Satuan: BA)</b>	<b>4,00</b>	<b>1.882.491.2 00,00</b>	<b>1,00</b>	<b>900.657.7 24,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.136.20 4.900,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.119.8 45.432, 00</b>	<b>100, 00</b>	<b>98,56</b>	<b>1,00</b>	<b>492.144. 500,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.512.647 .656,00</b>	<b>75,0 0</b>	<b>133,47</b>
5.03.0 2.2.02 .0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah, (Satuan: Dokumen )	1,00	800.000.000 ,00	3,00	245.667.9 70,00	1,00	829.834. 900,00	1,00	814.342 .330,00	100, 00	98,13	1,00	92.794.7 00,00	5,00	1.152.805. 000,00	500, 00	144,10
5.03.0 2.2.02 .0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, (Satuan: Dokumen )	14,0 0	632.491.200 ,00	4.19 2,00	172.259.5 40,00	14,00	147.998. 500,00	14,0 0	147.489 .304,00	100, 00	99,66	14,00	162.123. 100,00	4.22 0,00	481.871.9 44,00	30.1 42,8 6	76,19

5.03.0 2.2.02 .0003.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN, (Satuan: Dokumen )	1,00	450.000.000,00	1,00	482.730.214,00	1,00	158.371.500,00	1,00	158.013.798,00	100,00	99,77	1,00	237.226.700,00	3,00	877.970.712,00	300,00	195,10
<b>5.03.0 2.2.03 .0003.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, (Satuan: BA)</b>	<b>4,00</b>	<b>11.266.758.281,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.572.482.411,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.032.191.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.013.746.827,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,21</b>	<b>1,00</b>	<b>655.989.300,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3.242.218.538,00</b>	<b>75,00</b>	<b>28,78</b>
5.03.0 2.2.03 .0001.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya, (Satuan: Orang)	250,00	2.470.269.376,00	1,00	200.000.000,00	250,00	436.179.300,00	250,00	432.279.300,00	100,00	99,11	250,00	207.325.000,00	501,00	839.604.300,00	200,40	33,99
5.03.0 2.2.03 .0002.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center, (Satuan: Dokumen )	1,00	1.200.000.000,00	1,00	972.480.115,00	1,00	254.186.500,00	1,00	248.284.700,00	100,00	97,68	1,00	114.912.800,00	3,00	1.335.677.615,00	300,00	111,31
5.03.0 2.2.03 .0003.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, (Satuan: Dokumen )	1,00	1.092.552.107,00	0,00	0,00	1,00	203.262.900,00	1,00	202.586.937,00	100,00	99,67	1,00	85.381.600,00	2,00	287.968.537,00	200,00	26,36
5.03.0 2.2.03 .0004.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan, (Satuan: Orang)	100,00	1.000.000.000,00	1,00	242.000.000,00	100,00	4.704.400,00	142,00	4.704.400,00	142,00	100,00	100,00	0,00	243,00	246.704.400,00	243,00	24,67
5.03.0 2.2.03 .0005.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, (Satuan: Dokumen )	1,00	62.458.798,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00
5.03.0 2.2.03 .0006.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan, (Satuan: Orang)	120,00	1.819.876.300,00	1,00	60.708.509,00	120,00	101.509.200,00	120,00	97.187.200,00	100,00	95,74	120,00	80.146.800,00	241,00	238.042.509,00	200,83	13,08
5.03.0 2.2.03 .0008.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, (Satuan: Orang)	120,00	1.601.725.400,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00	0,00
5.03.0 2.2.03 .0013.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina, (Satuan: Orang)	500,00	200.000.000,00	80,00	22.190.527,00	500,00	9.915.000,00	500,00	8.211.790,00	100,00	82,82	500,00	17.203.900,00	1.080,00	47.606.217,00	216,00	23,80

5.03.0 2.2.03 .0014.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir, (Satuan: Orang)	100,00	1.819.876.300,00	1,00	75.103.260,00	100,00	22.433.700,00	170,00	20.492.500,00	170,00	91,35	100,00	151.019.200,00	271,00	246.614.960,00	271,00	13,55
<b>5.03.0 2.2.04 .</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: BA)</b>	<b>4,00</b>	<b>2.520.653.962,00</b>	<b>1,00</b>	<b>655.665.424,00</b>	<b>1,00</b>	<b>281.293.500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>277.598.299,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,69</b>	<b>1,00</b>	<b>451.690.500,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1.384.954.223,00</b>	<b>75,00</b>	<b>54,94</b>
5.03.0 2.2.04 .0001.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: Dokumen )	1,00	187.470.684,00	2,00	147.853.710,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1,00	0,00	3,00	147.853.710,00	300,00	78,87
5.03.0 2.2.04 .0002.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, (Satuan: Dokumen )	12,00	436.561.428,00	14,00	82.159.880,00	12,00	106.133.900,00	12,00	105.514.050,00	100,00	99,42	12,00	151.466.200,00	38,00	339.140.130,00	316,67	77,68
5.03.0 2.2.04 .0004.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan , (Satuan: Orang)	9,00	323.991.900,00	9,00	66.508.239,00	9,00	76.637.300,00	9,00	75.368.449,00	100,00	98,34	9,00	107.985.800,00	27,00	249.862.488,00	300,00	77,12
5.03.0 2.2.04 .0005.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa , (Satuan: Orang)	150,00	400.000.000,00	2,00	53.159.448,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	150,00	0,00	152,00	53.159.448,00	101,33	13,29
5.03.0 2.2.04 .0007.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan , (Satuan: Orang)	73,00	349.024.090,00	15,00	179.224.947,00	71,00	36.052.100,00	71,00	35.086.100,00	100,00	97,32	73,00	87.338.700,00	159,00	301.649.747,00	217,81	86,43
5.03.0 2.2.04 .0008.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, (Satuan: Laporan)	12,00	460.605.860,00	12,00	101.773.900,00	12,00	48.884.400,00	12,00	48.455.200,00	100,00	99,12	12,00	69.953.000,00	36,00	220.182.100,00	300,00	47,80
5.03.0 2.2.04 .0009.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani, (Satuan: Dokumen)	12,00	363.000.000,00	12,00	24.985.300,00	12,00	13.585.800,00	12,00	13.174.500,00	100,00	96,97	12,00	34.946.800,00	36,00	73.106.600,00	300,00	20,14

5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5.04.0 2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	10,06	46.353.848.521,00	9,04	2.687.611.548,00	9,86	1.141.387.400,00	9,86	1.108.487.400,00	100,00	97,12	10,06	941.410.500,00	28,96	4.737.509.448,00	287,87	10,22
5.04.0 2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, (Satuan: BA)	4,00	1.188.556.380,00	1,00	740.000.000,00	1,00	489.484.600,00	1,00	489.484.600,00	100,00	100,00	1,00	134.757.000,00	3,00	1.364.241.600,00	75,00	114,78
5.04.0 2.2.01 .0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi, (Satuan: Orang)	110,00	1.188.556.380,00	1,00	740.000.000,00	100,00	489.484.600,00	100,00	489.484.600,00	100,00	100,00	110,00	134.757.000,00	211,00	1.364.241.600,00	191,82	114,78
5.04.0 2.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, (Satuan: BA)	4,00	8.432.400.077,00	1,00	1.947.611.548,00	1,00	651.902.800,00	1,00	619.002.800,00	100,00	94,95	1,00	806.653.500,00	3,00	3.373.267.848,00	75,00	40,00

5.04.0 2.2.02 .0001.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun, (Satuan: Dokumen)	1,00	113.694.758,00	1,00	74.627.598,00	1,00	52.832.400,00	1,00	52.832.400,00	100,00	100,00	1,00	50.688.500,00	3,00	178.148.498,00	300,00	156,69
5.04.0 2.2.02 .0007.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, (Satuan: Laporan)	1,00	8.318.705.319,00	1,00	1.872.983.950,00	1,00	599.070.400,00	1,00	566.170.400,00	100,00	94,51	1,00	755.965.000,00	3,00	3.195.119.350,00	300,00	38,41

Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BKPSDM Kabupaten Cirebon telah memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. BKPSDM Kabupaten Cirebon memiliki dua indikator kinerja sasaran dan empat indikator kinerja program, dengan rencana target capaian dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, adalah seperti dalam tabel II.3 .

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Cirebon.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Cirebon adalah **“Indeks Sistem Merit yang diperoleh dari Aplikasi SIPINTER KASN dan Nilai LKIP BKPSDM dari Hasil Penilaian oleh Inspektorat** dengan target Indeks Sistem Merit sebesar 315 poin dan Nilai LKIP BKPSDM sebesar 74 poin pada Tahun 2025. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditentukan targetnya menjadi sarana untuk mencapai ASN yang profesional dan berkualitas. Melalui perencanaan pegawai, rekrutmen CPNS, pengelolaan data informasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, penilaian kompetensi, mutasi, promosi, kesejahteraan, pengelolaan disiplin, pola karir, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi serta peningkatan kompetensi teknis menjadi bagian dalam pencapaian profesionalitas ASN yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026, BKPSDM telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam 2 (dua) tahun periode 2025-2026 dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, seperti tertuang dalam Tabel II.3 tentang Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Periode 2025-2026.

**Tabel II.3**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mendukung pada Tujuan dan Sasaran RPD Periode 2025-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Poin)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (Poin)
			2024 Poin	2025 Poin	2026 (Poin)	
<b>1</b>	<b>Indeks Sistem Merit (poin)</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>315</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
1.1	nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN	81	82	83	84	84
1.2	nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi	121,5	123	128	134	134
1.3	nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN	97,5	100	104	107	107

(Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon).

Berdasarkan data pada Tabel II.3 bahwa BKPSDM Kabupaten Cirebon mempunyai 3 (tiga) Indikator Program Teknis untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis PD yaitu Indeks Profesionalitas ASN Meningkat. Adapun indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Periode 2025-2026 adalah Indeks Sistem Merit. BKPSDM Kabupaten Cirebon mempunyai 1 (satu) indikator program pendukung dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu hasil penilaian LKIP BKPSDM oleh Inspektorat Kab. Cirebon dengan target nilai 74 (BB) untuk Tahun 2025 dan 75 (BB) untuk Tahun 2026. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diampu oleh Sekretariat BKPSDM Kabupaten Cirebon.

Formula untuk menghitung indikator sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Cirebon adalah penjumlahan dari: “10% Perencanaan Kebutuhan ASN + 10% Pengadaan ASN + 30% Pengembangan Karir ASN + 10% Promosi dan Mutasi ASN + 20% Manajemen Kinerja ASN + + 10% Penggajian, Penghargaan dan Disiplin ASN + 4% Perlindungan dan Pelayanan ASN + 6% Sistem Informasi ASN.”

Kinerja pelayanan perangkat daerah dijabarkan pada Tabel II.4 berikut :

**Tabel II.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Cirebon**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Indikator Sasaran/ IKU</b>												
1	Indeks Sistem Merit (Poin)			300	305	315	325	298,5	0	315	325	
2	Nilai LKIP BKPSDM (Poin)			73,00	73,60	74	75	73,60	0	74	75	
<b>B. Indikator Program</b>												
1	Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN (Poin)			81	82	83	84	88,5	0	83	84	
2	Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi (Poin)			121,5	123	128	134	102,5	0	128	134	
3	Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN (Poin)			97,5	100	104	107	107,5	0	104	107	
4	Nilai IKM BKPSDM (Poin)			92	95	95	95,01	92,08	0	95	95,01	

Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Beberapa isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, antara lain :

1. Mewujudkan manajemen karier dan manajemen talenta SDM untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas;
2. Meningkatkan kompetensi ASN, sehingga kesenjangan kompetensi ASN menurun;
3. Melaksanakan penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan promosi;
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi.

Dalam penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) serta tantangan (*threat*).

Aspek kekuatan (*strength*) adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas fungsi BKPSDM yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BKPSDM, seperti :

1. Adanya perencanaan pengadaan pegawai berdasarkan formasi pegawai;
2. Adanya standar kompetensi jabatan bagi pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dijabarkan berdasarkan analisa jabatan dan tugas pokok fungsi;
3. Adanya unit penilaian kompetensi pegawai untuk melaksanakan penilaian kompetensi pegawai;
4. Adanya penilaian kinerja pegawai dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN melalui <https://kinerja.bkn.go.id/login>;
5. Adanya tunjangan kinerja dinamis berdasarkan capaian kinerja pegawai;
6. Adanya regulasi tentang pola karier pegawai;
7. Adanya layanan data dan informasi kepegawaian (SIMPEG) melalui alamat [simpeg.cirebonkab.go.id](http://simpeg.cirebonkab.go.id);
8. Adanya pembinaan jabatan fungsional pegawai.

Aspek kelemahan (*weakness*) adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BKPSDM yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BKPSDM, seperti :

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepegawaian dikarenakan masih terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang dilaksanakan secara manual.

Aspek peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BKPSDM, seperti:

1. Adanya UU dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian;
2. Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan;
3. Perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Aspek tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDM, seperti:

1. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa target ASN mengikuti diklat minimal 20 JPL/ASN per tahun;
2. Permenpan RB No 25 Tahun 2021 tentang tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi;
3. Permenpan No 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. *Strengths-Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness-Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengths-Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness-Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 adalah Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Rencana awal RKPD tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam

menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-PD) Tahun 2025.

BKPSDM Kabupaten Cirebon sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, mempunyai kewajiban mendukung Tujuan Pembangunan Daerah khususnya tujuan ke 3 yaitu Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Kolaboratif serta mendukung tercapainya Sasaran Daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat,

Strategi untuk mencapai sasaran daerah tersebut melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan ASN, peningkatan kuantitas JF yang terlayani, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, peningkatan kualitas data ASN, peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai, melalui upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung tema RKPD Tahun 2025.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal perangkat daerah, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal perangkat daerah disajikan dalam tabel II.5.

**Tabel II.5**  
**Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah tahun 2025**  
**Kabupaten Cirebon**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
0,	NON URUSAN				23.039.000.000	NON URUSAN				18.275.330.700		
0.00.	NON BIDANG URUSAN				23.039.000.000	NON BIDANG URUSAN				18.275.330.700		
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM BKPSDM	95	poin	23.039.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM BKPSDM	95	poin	18.275.330.700
0.00.01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	BA	365.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	BA	120.866.500
0.00.01. 2.01.00 0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	20.437.500
0.00.01. 2.01.00 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	-

0.00.01. 2.01.00 0 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	-	
0.00.01. 2.01.00 0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	-	
0.00.01. 2.01.00 0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	-	
0.00.01. 2.01.00 0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4.731.000	
0.00.01. 2.01.00 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	195.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	95.698.000	
<b>0.00.01. 2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>15.122.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>16.230.362.600</b>	

0.00.01. 2.02.00 0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	Orang/bulan	15.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	Orang/bulan	16.218.787.000	
0.00.01. 2.02.00 0 3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	35.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	-	
0.00.01. 2.02.00 0 4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	-	
0.00.01. 2.02.00 0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	17.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6.536.700	
0.00.01. 2.02.00 0 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Laporan	5.038.900	
0.00.01. 2.03. 0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>34.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>0</b>	
0.00.01. 2.03.00 0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	17.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	-	

0.00.01. 2.03.00 0 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	17.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	-	
<b>0.00.01. 2.05.</b>	<b>Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>0</b>	
0.00.01. 2.05.00 0 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	-	
0.00.01. 2.05.00 0 3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	1	Dokumen	30.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	1	Dokumen	-	
<b>0.00.01. 2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>2.482.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>1.386.431.900</b>	
0.00.01. 2.06.00 0 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.500.900	
0.00.01. 2.06.00 0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	913.947.300	
0.00.01. 2.06.00 0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	51.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.187.900	

0.00.01. 2.06.00 0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	44.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	-
0.00.01. 2.06.00 0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	115.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	68.351.600
0.00.01. 2.06.00 0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	84.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	83.856.200
0.00.01. 2.06.00 0 7.	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	172.371.700
0.00.01. 2.06.00 0 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.301.200
0.00.01. 2.06.00 0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	104.203.600
0.00.01. 2.06.00 1 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	85.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	18.711.500
<b>0.00.01. 2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>2.604.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>0</b>
0.00.01. 2.07.00	Pengadaan Kendaraan Dinas		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2	Unit	504.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2	Unit	-

0 2.	Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Disediakan				Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Disediakan			
0.00.01. 2.07.00 0 5.	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	-
0.00.01. 2.07.00 1 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	2.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-
<b>0.00.01. 2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>1.102.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>367.406.300</b>
0.00.01. 2.08.00 0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	-
0.00.01. 2.08.00 0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	700.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	328.761.200
0.00.01. 2.08.00 0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	52.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	38.645.100
0.00.01. 2.08.00 0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	275.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	-

0.00.01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	BA	1.200.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	BA	170.263.400
0.00.01. 2.09.00 0 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	Unit	4.811.000
0.00.01. 2.09.00 0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	11.180.000
0.00.01. 2.09.00 0 5.	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	-
0.00.01. 2.09.00 0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	-
0.00.01. 2.09.00 0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	770.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	154.272.400
5,	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>BKPSDM</b>				<b>29.474.000.000</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>BKPSDM</b>				<b>12.267.969.020</b>
5.03.	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>BKPSDM</b>				<b>21.415.000.000</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>BKPSDM</b>				<b>5.337.434.800</b>

5.03.02.	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	BKPSDM	Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit	83	Poin	8.043.000.000	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	BKPSDM	Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit	83	Poin	<b>1.091.217.700</b>
			Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit	128	Poin	11.062.000.000			Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit	128	Poin	<b>3.782.393.800</b>
		BKPSDM	Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit	104	Poin	2.310.000.000		BKPSDM	Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit	104	Poin	<b>463.823.300</b>
5.03.02. 2.01.	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	BKPSDM	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>8.043.000.000</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	BKPSDM	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>1.091.217.700</b>
5.03.02. 2.01.00 0 2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	3.872.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	539.665.700
5.03.02. 2.01.00 0 3.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	2.000.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	-

5.03.02. 2.01.00 0 6.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12	Dokumen	285.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12	Dokumen	196.019.900	
5.03.02. 2.01.00 0 7.	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	58.000.000	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	-	
5.03.02. 2.01.00 0 8.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	951.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	133.882.600	
5.03.02. 2.01.00 1 0.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	114.563.600	
5.03.02. 2.01.00 1 1.	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6	Dokumen	77.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6	Dokumen	23.377.900	
5.03.02. 2.01.00 1 2.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	300.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	83.708.000	
<b>5.03.02. 2.02.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>993.519.900</b>	
5.03.02. 2.02.00 0 1.	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	600.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	428.822.200	

5.03.02. 2.02.00 0 2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14	Dokumen	350.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14	Dokumen	202.223.100	
5.03.02. 2.02.00 0 3.	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	600.000.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	362.474.600	
<b>5.03.02. 2.03.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>9.512.000.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>2.788.873.900</b>	
5.03.02. 2.03.00 0 1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	Orang	2.215.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	Orang	1.671.815.000	
5.03.02. 2.03.00 0 2.	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	1.000.000.000	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	609.952.900	
5.03.02. 2.03.00 0 3.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	903.000.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	370.321.000	
5.03.02. 2.03.00 0 4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Orang	908.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Orang	-	
5.03.02. 2.03.00 0 5.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	Dokumen	52.000.000	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	Dokumen	-	
5.03.02. 2.03.00 0 6.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	100	Orang	1.505.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	100	Orang	86.096.800	

5.03.02. 2.03.00 0 8.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	Orang	1.324.000.000	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	Orang	-
5.03.02. 2.03.00 1 3.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100	Orang	100.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100	Orang	20.953.900
5.03.02. 2.03.00 1 4.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100	Orang	1.505.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100	Orang	29.734.300
<b>5.03.02. 2.04.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>2.310.000.000</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>463.823.300</b>
5.03.02. 2.04.00 0 1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	155.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	-
5.03.02. 2.04.00 0 2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12	Dokumen	500.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12	Dokumen	158.642.100
5.03.02. 2.04.00 0 4.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9	Orang	275.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9	Orang	95.798.200
5.03.02. 2.04.00 0 5.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100	Orang	300.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100	Orang	-

5.03.02. 2.04.00 0 7.	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	73	Orang	500.000.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	73	Orang	99.913.200	
5.03.02. 2.04.00 0 8.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan	380.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan	76.323.000	
5.03.02. 2.04.00 09.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12	Dokumen	200.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12	Dokumen	33.146.800	
<b>5.04.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>8.059.000.000</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>6.930.534.220</b>	
<b>5.04.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit</b>	<b>128</b>	<b>Poin</b>	<b>8.059.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit</b>	<b>128</b>	<b>Poin</b>	<b>6.930.534.220</b>	
<b>5.04.02. 2.01.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>983.000.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>1</b>	<b>BA</b>	<b>465.804.500</b>	
5.04.02. 2.01.00 0 3.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	Orang	983.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	Orang	465.804.500	

5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	BA	7.076.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	BA	6.464.729.720
5.04.02.2.02.001.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	200.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	199.004.500
5.04.02.2.02.007.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	6.876.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	6.265.725.220

Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh *stakeholders* BKPSDM Kabupaten Cirebon. BKPSDM Kabupaten Cirebon merupakan perangkat daerah penunjang sasaran Kabupaten Cirebon yaitu meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan sehingga BKPSDM berhubungan dengan kepegawaian dan pengembangan SDM di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, BKPSDM mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai tugasnya yaitu :

1. Melaksanakan penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan promosi;
2. Mewujudkan manajemen karier dan manajemen talenta SDM untuk mewujudkan ASN yang professional dan berintegritas;
3. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN sertasebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN;
4. Pengembangan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan.



# BAB 3

## Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*
2. *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*
3. *Program dan Kegiatan*

### **4.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan :

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, responsibel, serta reliabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Renja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yaitu Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas serta Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dengan Indikator tujuan yang ditetapkan yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai SAKIP Pemda Hasil Penilaian oleh KemenpanRB. Keberhasilan pencapaian Sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator sasaran.

Formula untuk menghitung indikator sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Cirebon adalah Penilaian terhadap 8 Aspek Sistem Merit :

1. Perencanaan Kebutuhan (Bobot 10%);
2. Pengadaan (Bobot 10%);
3. Pengembangan Karir (Bobot 30%);
4. Promosi dan Mutasi (Bobot 10%);
5. Manajemen Kinerja (Bobot 20%);

6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (Bobot 10%);
7. Perlindungan dan Pelayanan (Bobot 4%); dan
8. Sistem Informasi (Bobot 6%).

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung pencapaian tujuan ketiga dari Pembangunan Daerah yaitu Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Kolaboratif. Dukungan terhadap ASN Profesional dan Berkualitas diwujudkan dalam penyediaan pegawai yang profesional dan kompeten dalam bentuk ASN yang berkualitas. Kualitas ASN diperoleh dari penguatan manajemen ASN, salah satunya melalui penerapan sistem merit sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, suku, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, umur dan sebagainya. *Merit Sistem* sebagaimana dimaksud dalam UU ASN dilakukan melalui:

1. seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif;
2. menerapkan prinsip fairness;
3. penggajian, reward and punishment berbasis kinerja;
4. standar integritas dan perilaku untuk kepentingan public;
5. manajemen SDM secara efektif dan efisien; dan
6. melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Selain penerapan sistem merit, dalam rangka akuntabilitas tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dibutuhkan pengembangan SDM sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM pegawai.

Berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Kemendagri 50.5889 Tahun 2021, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun 2025 sesuai hasil analisa program dan kebutuhan anggaran khususnya Belanja Operasi Non Urusan membutuhkan anggaran sebesar Rp30.543.299.720,- dengan rincian pada Tabel III.1.

**Tabel III.1**  
**Kodefikasi, Nomenklatur serta Rencana Anggaran BKPSDM**  
**Kabupaten Cirebon**

Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Usulan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)
<b>0,</b>	<b>NON URUSAN</b>	<b>18.275.330.700</b>
<b>0.00.</b>	<b>NON BIDANG URUSAN</b>	<b>18.275.330.700</b>
<b>0.00.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>18.275.330.700</b>
<b>0.00.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>120.866.500</b>
0.00.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.437.500
0.00.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.731.000
0.00.01.2.01.000 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.698.000
<b>0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.230.362.600</b>
0.00.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.218.787.000
0.00.01.2.02.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.536.700
0.00.01.2.02.000 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.038.900
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.386.431.900</b>
0.00.01.2.06.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.900
0.00.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	913.947.300
0.00.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.187.900
0.00.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.351.600
0.00.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.856.200
0.00.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	172.371.700
0.00.01.2.06.000 8.	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.301.200
0.00.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.203.600
0.00.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.711.500
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>367.406.300</b>
0.00.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.761.200
0.00.01.2.08.000 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.645.100
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170.263.400</b>
0.00.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.811.000

0.00.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.180.000
0.00.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.272.400
<b>5.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>12.267.969.020</b>
<b>5.03.</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>5.337.434.800</b>
<b>5.03.02.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.091.217.700</b>
<b>5.03.02.2.01.</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.091.217.700</b>
5.03.02.2.01.000 2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	539.665.700
5.03.02.2.01.000 6.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	196.019.900
5.03.02.2.01.000 8.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	133.882.600
5.03.02.2.01.001 0.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	114.563.600
5.03.02.2.01.001 1.	Pengelolaan Data Kepegawaian	23.377.900
5.03.02.2.01.001 2.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	83.708.000
<b>5.03.02.2.02.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>993.519.900</b>
5.03.02.2.02.000 1.	Pengelolaan Mutasi ASN	428.822.200
5.03.02.2.02.000 2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	202.223.100
5.03.02.2.02.000 3.	Pengelolaan Promosi ASN	362.474.600
<b>5.03.02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>2.788.873.900</b>
5.03.02.2.03.000 1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.671.815.000
5.03.02.2.03.000 2.	Pengelolaan Assessment Center	609.952.900
5.03.02.2.03.000 3.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	370.321.000
5.03.02.2.03.000 6.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	86.096.800
5.03.02.2.03.001 3.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	20.953.900
5.03.02.2.03.001 4.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	29.734.300
<b>5.03.02.2.04.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>463.823.300</b>
5.03.02.2.04.000 2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	158.642.100
5.03.02.2.04.000 4.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	95.798.200
5.03.02.2.04.000 7.	Pembinaan Disiplin ASN	99.913.200
5.03.02.2.04.000 8.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	76.323.000
5.03.02.2.04.000 9.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	33.146.800
<b>5.04.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>6.930.534.220</b>
<b>5.04.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>6.930.534.220</b>
<b>5.04.02.2.01.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>465.804.500</b>

5.04.02.2.01.000 3.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	465.804.500
<b>5.04.02.2.02.</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>6.464.729.720</b>
5.04.02.2.02.000 1.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	199.004.500
5.04.02.2.02.000 7.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.265.725.220
<b>JUMLAH</b>		<b>30.543.299.720</b>



# BAB 4

## Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

### ***Bab 4 Berisi :***

- 1. Rencana kerja dan pendanaan*

### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Cirebon disajikan dalam tabel IV.1 sebagai berikut :

**Tabel IV.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan**  
**Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Cirebon**

**Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>0,</b>	<b>NON URUSAN</b>				<b>18.275.330.700</b>				<b>26.134.000.000</b>
<b>0.00.</b>	<b>NON BIDANG URUSAN</b>				<b>18.275.330.700</b>				<b>26.134.000.000</b>
<b>0.00.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai IKM BKPSDM</b>		<b>95 Persen</b>	<b>18.275.330.700</b>			<b>95,01 Persen</b>	<b>26.134.000.000</b>
<b>0.00.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>1 BA</b>	<b>120.866.500</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>387.000.000</b>
0.00.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	2 Dokumen	20.437.500	PIS		2 Dokumen	30.000.000
0.00.01.2.01.000 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	30.000.000
0.00.01.2.01.000 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	30.000.000
0.00.01.2.01.000 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	30.000.000

0.00.01.2.01.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	30.000.000
0.00.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	2 Laporan	4.731.000	PIS		2 Laporan	22.000.000
0.00.01.2.01.000 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	8 Laporan	95.698.000	PIS		8 Laporan	215.000.000
<b>0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>1 BA</b>	<b>16.230.362.600</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>16.131.000.000</b>
0.00.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	95 Orang/bulan	16.218.787.000	PIS		95 Orang/bulan	16.000.000.000
0.00.01.2.02.000 3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	35.000.000
0.00.01.2.02.000 4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKPSDM	12 Dokumen	-			12 Dokumen	39.000.000
0.00.01.2.02.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	1 Laporan	6.536.700	PIS		1 Laporan	18.000.000
0.00.01.2.02.000 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM	13 Laporan	5.038.900	PIS		13 Laporan	39.000.000
<b>0.00.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>1 BA</b>	<b>-</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>36.000.000</b>

0.00.01.2.03.000 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	-		1 Dokumen	18.000.000
0.00.01.2.03.000 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	12 Laporan	-		12 Laporan	18.000.000
<b>0.00.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1 BA</b>	-	<b>PIS</b>	<b>1 BA</b>	<b>140.000.000</b>
0.00.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM	1 Paket	-		1 Paket	110.000.000
0.00.01.2.05.000 3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	-		1 Dokumen	30.000.000
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1 BA</b>	<b>1.386.431.900</b>	<b>PIS</b>	<b>1 BA</b>	<b>3.124.000.000</b>
0.00.01.2.06.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	7.500.900	PIS	1 Paket	14.000.000
0.00.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	913.947.300	PIS	1 Paket	2.000.000.000
0.00.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	2.187.900	PIS	1 Paket	56.000.000
0.00.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	-		1 Paket	48.000.000
0.00.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	68.351.600	PIS	1 Paket	127.000.000
0.00.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BKPSDM	12 Dokumen	83.856.200	PIS	12 Dokumen	92.000.000
0.00.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	172.371.700	PIS	1 Paket	350.000.000

0.00.01.2.06.000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	12 Laporan	15.301.200	PIS		12 Laporan	44.000.000
0.00.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	12 Laporan	104.203.600	PIS		12 Laporan	300.000.000
0.00.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	18.711.500	PIS		1 Dokumen	93.000.000
<b>0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1 BA</b>	<b>-</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>3.704.000.000</b>
0.00.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BKPSDM	2 Unit	-			2 Unit	554.000.000
0.00.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BKPSDM	20 Unit	-			20 Unit	150.000.000
0.00.01.2.07.001 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	1 Unit	-			1 Unit	3.000.000.000
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1 BA</b>	<b>367.406.300</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>1.237.000.000</b>
0.00.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	1 Laporan	-			1 Laporan	80.000.000
0.00.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	12 Laporan	328.761.200	PIS		12 Laporan	800.000.000
0.00.01.2.08.000 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	38.645.100	PIS		1 Laporan	57.000.000
0.00.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	-			1 Laporan	300.000.000

<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1 BA</b>	<b>170.263.400</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>1.375.000.000</b>
0.00.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	23 Unit	4.811.000	PIS		23 Unit	400.000.000
0.00.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM	1 Unit	11.180.000	PIS		1 Unit	35.000.000
0.00.01.2.09.000 5.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BKPSDM	20 Unit	-			20 Unit	50.000.000
0.00.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM	10 Unit	-			10 Unit	50.000.000
0.00.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM	2 Unit	154.272.400	PIS		2 Unit	840.000.000
<b>5,</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>12.267.969.020</b>				<b>33.284.000.000</b>
<b>5.03.</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>5.337.434.800</b>				<b>24.390.000.000</b>
<b>5.03.02.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit</b>		<b>83 Poin</b>	<b>1.091.217.700</b>			<b>84 Poin</b>	<b>9.645.000.000</b>
		<b>Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit</b>		<b>128 Poin</b>	<b>3.782.393.800</b>			<b>134 Poin</b>	<b>16.155.000.000</b>
		<b>Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan &amp; disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit</b>		<b>104 Poin</b>	<b>463.823.300</b>			<b>107 Poin</b>	<b>2.590.000.000</b>

<b>5.03.02.2.01.</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>1 BA</b>	<b>1.091.217.700</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>9.645.000.000</b>
5.03.02.2.01.000 2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	1 Dokumen	539.665.700	PIS		1 Dokumen	4.259.000.000
5.03.02.2.01.000 3.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	3.000.000.000
5.03.02.2.01.000 6.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	12 Dokumen	196.019.900	PIS		12 Dokumen	312.000.000
5.03.02.2.01.000 7.	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	63.000.000
5.03.02.2.01.000 8.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	1 Lembaga	133.882.600	PIS		1 Lembaga	1.047.000.000
5.03.02.2.01.001 0.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	114.563.600	PIS		1 Dokumen	550.000.000
5.03.02.2.01.001 1.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	6 Dokumen	23.377.900	PIS		6 Dokumen	84.000.000
5.03.02.2.01.001 2.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Laporan	83.708.000	PIS		1 Laporan	330.000.000
<b>5.03.02.2.02.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>1 BA</b>	<b>993.519.900</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>1.800.000.000</b>
5.03.02.2.02.000 1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	1 Dokumen	428.822.200	PIS		1 Dokumen	700.000.000
5.03.02.2.02.000 2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	14 Dokumen	202.223.100	PIS		14 Dokumen	400.000.000
5.03.02.2.02.000 3.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	1 Dokumen	362.474.600	PIS		1 Dokumen	700.000.000

<b>5.03.02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>1 BA</b>	<b>2.788.873.900</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>14.355.000.000</b>
5.03.02.2.03.000 1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	BKPSDM	100 Orang	1.671.815.000	PIS		100 Orang	6.338.000.000
5.03.02.2.03.000 2.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	1 Dokumen	609.952.900	PIS		1 Dokumen	1.100.000.000
5.03.02.2.03.000 3.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDM	1 Dokumen	370.321.000	PIS		1 Dokumen	994.000.000
5.03.02.2.03.000 4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	100 Orang	-			100 Orang	950.000.000
5.03.02.2.03.000 5.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	57.000.000
5.03.02.2.03.000 6.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	BKPSDM	100 Orang	86.096.800	PIS		100 Orang	1.655.000.000
5.03.02.2.03.000 8.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	100 Orang	-			100 Orang	1.456.000.000
5.03.02.2.03.001 3.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	BKPSDM	100 Orang	20.953.900	PIS		100 Orang	150.000.000
5.03.02.2.03.001 4.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	BKPSDM	100 Orang	29.734.300	PIS		100 Orang	1.655.000.000
<b>5.03.02.2.04.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>1 BA</b>	<b>463.823.300</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>2.590.000.000</b>
5.03.02.2.04.000 1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Dokumen	-			1 Dokumen	170.000.000
5.03.02.2.04.000 2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	12 Dokumen	158.642.100	PIS		12 Dokumen	550.000.000
5.03.02.2.04.000 4.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM	9 Orang	95.798.200	PIS		9 Orang	300.000.000

5.03.02.2.04.000 5.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM	100 Orang	-			100 Orang	350.000.000
5.03.02.2.04.000 7.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	73 Orang	99.913.200	PIS		73 Orang	550.000.000
5.03.02.2.04.000 8.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	12 Laporan	76.323.000	PIS		12 Laporan	420.000.000
5.03.02.2.04.000 9.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	BKPSDM	12 Dokumen	33.146.800	PIS		12 Dokumen	250.000.000
<b>5.04.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>6.930.534.220</b>				<b>8.894.000.000</b>
<b>5.04.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit</b>		<b>128 Poin</b>	<b>6.930.534.220</b>			<b>134 Poin</b>	<b>8.894.000.000</b>
<b>5.04.02.2.01.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>1 BA</b>	<b>465.804.500</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>1.080.000.000</b>
5.04.02.2.01.000 3.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	100 Orang	465.804.500	PIS		100 Orang	1.080.000.000
<b>5.04.02.2.02.</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>1 BA</b>	<b>6.464.729.720</b>	<b>PIS</b>		<b>1 BA</b>	<b>7.814.000.000</b>

5.04.02.2.02.000 1.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	BKPSDM	1 Dokumen	199.004.500	PIS		1 Dokumen	250.000.000
5.04.02.2.02.000 7.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	1 Laporan	6.265.725.220	PIS		1 Laporan	7.564.000.000
<b>J U M L A H</b>					<b>30.543.299.720</b>				<b>59.418.000.000</b>

Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon



# BAB 5

## Penutup

### **Bab 5 Berisi :**

#### *1. Penutup*

### **5.1. Catatan Penting**

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran secara detail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini merupakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun 2025 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan BKPSDM Kabupaten Cirebon. Dengan demikian Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran BKPSDM yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai misi dan visi organisasi.

### **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Rencana Kerja BKPSDM, yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran BKPSDM Tahun 2025. RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BKPSDM Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2025 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Diharapkan setelah disusunnya Rencana Kerja ini program kerja dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

